BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan jabatan sebagai notaris sangat penting dan dibutuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi notaris adalah sebagai Pejabat Umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik.¹ Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris merupakan suatu profesi mulia (*officium nobile*), karena sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban baik seseorang maupun badan hukum. Pembuatan akta oleh notaris akta sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan utama notaris disamping kewenangan-kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang

¹ Baharudin, Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah, *Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung*, Tahun 2014, hlm. 2.

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) yang menyatakan bahwa :

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta OTENTIK, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula :
 - a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g) Membuat akta risalah lelang

Kewenangan menjalankan profesi jabatan sebagai notaris pada dasarnya merupakan suatu jenis pekerjaan yang sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa dengan pemagangan dan dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik. Notaris dituntut untuk bekerja secara profesional dan mengedepankan kecermatan, kehati-hatian dalam bekerja agar produk yang dihasilkan benar-benar sempurna sehingga mempunyai kepastian hukum serta keadilan hukum dapat terwujud. Kewenangan pokok notaris adalah membuat akta otentik yang berkaitan erat dengan para pihaknya. Permintaan pembuatan akta otentik kepada notaris semakin hari semakin berkembang dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perlindungan dan kepastian hukum pada suatu perjanjian yang akan dibuatnya.²

Berdasarkan dalam ketentuan Pasal 17 (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, disebutkan bahwasanya notaris dilarang:

- a) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c) Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e) Merangkap jabatan sebagai advokat;

² E. Sumaryono, 2003, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 23.

- f) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwasanya notaris dilarang untuk rangkap jabatan. Ketentuan ini walaupun terdapat dalam undang-undang namun pada prakteknya masih ada ditemui Notaris yang merangkap jabatan atau ada pekerjaan lain. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Menurut Yasmin Mersi,³ bahwa seorang notaris berkewajiban untuk menjalankan tugas sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik. Kode etik membatasi tindak tanduk para notaris agar dalam menjalankan praktiknya dapat profesional dan beretika, tidak berpihak serta tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan jabatannya.

Profesi Notaris merupakan profesi yang terhormat karena tugas dari jabatannya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata. Namun pada kenyataannya dalam praktik, masih dapat ditrmukan oknum notaris yang membuat akta otentik pada saat menjabat sebagai pejabat negara, yang mana ini menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat penelitian ini. Yang mana dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, menyebutkan Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi dan tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam

³ Yasmin Mersi, *Kemandirian Notaris Dalam Perserikatan Perdata Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*". <http://mersiyasmin.co.id/2012/01/kemandirian-notaris->, diakses 16 Desember 2022

Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang. Pejabat Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terdiri atas :

- a) Presiden dan Wakil Presiden.
- b) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- d) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan.
- e) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung.
- f) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- g) Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri.
- h) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- i) Gubernur dan Wakil Gubernur.
- j) Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- k) Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan ini dengan judul **“Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Rangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara”**.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang di dapatkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah akta otentik dalam bentuk perjanjian yang dibuat oleh notaris rangkap jabatan sebagai pejabat negara memiliki kekuatan hukum yang sah ?
2. Apa akibat hukum akta otentik dalam bentuk perjanjian yang dibuat oleh notaris yang melanggar larangan rangkap jabatan seagai pejabat negara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan isu hukum yang telah ditemukan untuk diangkat dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa tujuan, yaitu:

1. Memahami dan menganalisa kekuatan hukum akta yang dibuat oleh notaris yang rangkap jabatan sebagai pejabat negara.
2. Memahami dan menganalisa akibat hukum atas akta yang dibuat oleh notaris yang melanggar larangan rangkap jabatan sebagai pejabat negara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk pengembangan teori hukum kenotariatan, khususnya masalah notaris yang rangkap jabatan sebagai pejabat negara.
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka masalah pembentukan undang-undang terhadap kepastian hukum akta otentik yang dibuat oleh notaris yang rangkap jabatan sebagai pejabat negara.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian mengenai “Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Akta Yang

Dibuat Oleh Notaris Rangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara”, merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan normatif, dimana penelitian lebih difokuskan mengenai pemberlakuan peraturan hukum secara normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.⁴ Adapun sifat penelitian merupakan penelitian kualitatif, dimana metode penelitian berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.⁵

1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan dengan Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁶

⁴ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

⁵ Punaji Setyosari, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Kencana, Jakarta, hlm. 34.

⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 18

1.5.2 Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum (*legal research*) yang bersifat normatif. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum* menjelaskan bahwa penelitian hukum (*legal research*) adalah untuk memecahkan isu-isu hukum yang sedang dihadapi dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan melakukan penalaran norma hukum, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum.⁷

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian yang terpenting di dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).⁸

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 60.

⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7.

undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).⁹ Bahan hukum primer dalam hal ini, meliputi:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW);
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Ham tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, penelitian hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁰

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan bahan hukum terhadap penelitian ini dilakukan

⁹ *Ibid.*, hlm 52.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 52.

dengan studi kepustakaan. Langkah-langkah yang lalui dalam pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan baha-bahan hukum. Selanjutnya mengklasifikasikan bahan-bahan hukum primer yang terkait dengan isu serta bahan-bahan hukum sekunder yang dikumpulkan sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Terakhir, menyusun bahan-bahan hukum yang telah diklasifikasi secara sistematis agar dapat mempermudah penulisan dalam menjawab isus hukum dalam penelitian tesis ini.¹¹

1.5.5 Pengelolah Data dan Analisis

Analisa bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op,Cit*, hlm. 60.

hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu ¹²:

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

¹² *Ibid.*, hlm. 171.